

Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan

Anjely N. F. Elungan¹, Muhammad Baharuddin Zubakhrom Tjenreng²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
mtsp.41.3539@ipdn.ac.id¹, tjenreng@gmail.com²

Submitted: 23rd Oct 2024 | Edited: 12th Jan 2025 | Issued: 18th Jan 2025

Cited on: Elungan, A. N. F., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 170-177.

ABSTRACT

Government policies in health services play an important role in ensuring access and quality of health services for all levels of society. This policy covers various aspects, from the provision of health facilities, financing, to the regulation of health workers and supervision of the health system. The government is responsible for designing and implementing policies that can reduce inequalities in access to health, increase the efficiency of the health system, and ensure quality and affordable services for the community. In this context, health policies must be adaptive to the dynamics of social, economic and technological developments. This research aims to analyze various policies that have been implemented by the government in the health sector, as well as the challenges and opportunities faced in their implementation. By understanding this policy, it is hoped that more effective solutions can be found to improve the quality of health services in the future.

Keywords: Government Policy, Health Services, Health Access, Service Quality, Health System

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara, terutama dalam konteks meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, pelayanan kesehatan diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata adalah hak dasar setiap warga negara. Di Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan ini, berbagai kebijakan telah dikeluarkan, termasuk kebijakan yang mendukung aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kesehatan, termasuk prevalensi penyakit menular dan tidak menular yang tinggi, serta disparitas akses layanan kesehatan di berbagai daerah. Dalam konteks ini, pemahaman tentang kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan menjadi sangat penting untuk menganalisis efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada tahun 2022, sekitar 83% penduduk Indonesia telah terdaftar dalam program JKN, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh rakyat (BPJS Kesehatan, 2022).

Kebijakan kesehatan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah telah berupaya untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Berbagai masalah seperti kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, dan ketidakmerataan distribusi fasilitas kesehatan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.

Selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, tuntutan terhadap pelayanan yang berkualitas dan terjangkau semakin meningkat. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang kebijakan yang ada, serta dampaknya, sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem kesehatan di Indonesia.

Namun, meskipun ada peningkatan dalam cakupan jaminan kesehatan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, kesenjangan dalam kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah dalam pendanaan dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), sistem kesehatan yang baik harus mampu memberikan layanan yang berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (WHO, 2020). Di Indonesia, kebijakan JKN merupakan langkah besar menuju sistem kesehatan yang lebih inklusif, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala.

Studi oleh Sari dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa meskipun JKN telah meningkatkan akses ke layanan kesehatan, banyak peserta yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan kurangnya tenaga medis yang berkualitas. Selain itu, masalah dalam sistem rujukan juga menjadi hambatan bagi pasien untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Hidayat dan Yulianto (2022) menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam kepuasan pasien antara rumah sakit yang dikelola pemerintah dan swasta. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dengan demikian, penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan akses, tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Pentingnya Kebijakan Kesehatan Nasional, Menurut Rasyid (2018), kebijakan kesehatan nasional berfungsi untuk merumuskan strategi, visi, dan misi yang dapat memperbaiki sistem kesehatan di suatu negara. Salah satu contoh kebijakan utama adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang universal bagi seluruh penduduk. Penelitian oleh Setiawan (2019) menunjukkan bahwa keberadaan JKN telah meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, meskipun masih ada tantangan dalam hal pemerataan dan kualitas layanan di daerah terpencil.

Studi oleh Salim (2017) menyebutkan bahwa kebijakan dalam penyediaan dan pembiayaan layanan kesehatan memainkan peranan yang sangat penting dalam kualitas sistem kesehatan. Pembiayaan yang adil dan efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata. Menurut World Health Organization (WHO), sistem pembiayaan kesehatan yang baik dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama dalam konteks pengobatan penyakit serius atau kronis. Di Indonesia, kebijakan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan telah memberikan dampak positif bagi jaminan kesehatan masyarakat, meskipun terdapat tantangan dalam hal efisiensi dan keberlanjutan keuangan program ini (Kurniawan, 2020).

Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Kesehatan, Penelitian oleh Susanti (2021) menyoroti bahwa kesenjangan akses kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah besar dalam kebijakan kesehatan. Infrastruktur kesehatan yang belum merata, seperti kurangnya rumah sakit atau puskesmas di daerah terpencil, menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, kurangnya tenaga medis di daerah terpencil juga memperburuk kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan. Sejumlah kajian juga mengungkapkan bahwa kebijakan terkait pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sektor kesehatan sangat vital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas tenaga medis melalui pelatihan berkelanjutan dan distribusi tenaga kesehatan yang merata ke seluruh daerah, termasuk daerah dengan tingkat keterbatasan fasilitas, dapat meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan (Nurhayati, 2018).

Peran Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan, Penggunaan teknologi dalam kebijakan pelayanan kesehatan semakin mendapat perhatian. Literatur menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, seperti penggunaan telemedicine dan sistem informasi kesehatan (Hadi, 2020). Teknologi dapat membantu mengurangi jarak antara pasien dan penyedia layanan, terutama di daerah dengan fasilitas yang terbatas.

Evaluasi dan Tantangan Implementasi Kebijakan Kesehatan, Implementasi kebijakan kesehatan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, keterbatasan anggaran, dan resistensi dari tenaga medis atau masyarakat. Studi oleh Suprpto (2019) menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan secara berkala sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memainkan peran yang sangat krusial dalam meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi sistem kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan memperhatikan distribusi layanan yang merata di berbagai daerah, terutama di wilayah yang terpencil. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan akses, di mana masih terdapat ketimpangan dalam distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis di berbagai daerah. Selain itu, pembiayaan kesehatan juga menjadi isu sentral, mengingat biaya yang tinggi sering kali menghambat masyarakat, khususnya golongan tidak mampu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam sektor kesehatan juga merupakan faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga medis melalui pelatihan dan pendidikan, namun masih ada kekurangan dalam hal jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang diterapkan perlu bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tantangan yang muncul. Inovasi dalam pengelolaan layanan kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, sistem kesehatan yang lebih baik dan merata dapat tercapai, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis, pasien, dan pengelola fasilitas kesehatan. Selain itu, analisis dokumen kebijakan dan laporan tahunan dari BPJS Kesehatan juga digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan di beberapa daerah, termasuk kota besar dan daerah terpencil, untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan yang telah disusun sebelumnya, yang mencakup pertanyaan tentang pengalaman dan persepsi mereka terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari responden.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan keberhasilan dalam kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan kesehatan di masa depan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan JKN telah meningkatkan akses layanan kesehatan, masih terdapat masalah signifikan yang mempengaruhi kepuasan pasien. Banyak responden melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan rujukan ke spesialis dan sering kali harus menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan perawatan. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem rujukan yang tidak efisien menjadi salah satu hambatan utama dalam pelayanan kesehatan (Sari & Rahmawati, 2021).

Selain itu, analisis data juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, fasilitas kesehatan cenderung lebih lengkap dan memiliki tenaga medis yang lebih terlatih. Sebaliknya, di daerah pedesaan, banyak fasilitas kesehatan yang kekurangan peralatan dan tenaga medis, sehingga mengakibatkan kualitas layanan yang rendah. Menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 60% fasilitas kesehatan di daerah terpencil tidak memenuhi standar pelayanan minimum (Kementerian Kesehatan, 2022).

Peningkatan Infrastruktur Kesehatan, Kebijakan pemerintah dalam memperluas dan meningkatkan infrastruktur kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas, telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pembangunan rumah sakit baru dan

modern, serta peningkatan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terluar, membuat layanan kesehatan lebih terjangkau. Program pembangunan ini juga berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan di daerah yang selama ini kurang terlayani, sehingga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan mulai dapat dikurangi, meskipun masih ada tantangan besar dalam pemerataan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kebijakan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis, serta penerapan standar pelayanan yang lebih ketat, turut meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Meskipun demikian, beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga medis yang berkualitas dan merata.

Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan, Kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine dan sistem informasi kesehatan, telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan efisiensi dan akses layanan, terutama di daerah-daerah terpencil. Penggunaan teknologi memungkinkan masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Penguatan Sistem Pembiayaan Kesehatan, Pembiayaan kesehatan melalui program JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, telah membantu meringankan beban biaya kesehatan masyarakat. Program ini juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membayar biaya yang terlalu tinggi, sehingga mengurangi angka pengeluaran yang membebani keluarga. Meskipun demikian, keberlanjutan pembiayaan JKN masih menjadi tantangan utama, terutama dalam menghadapi defisit anggaran dan ketidakseimbangan antara jumlah iuran dan biaya yang dikeluarkan.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada, termasuk penguatan sistem rujukan dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Rekomendasi ini sejalan dengan pandangan WHO yang menekankan pentingnya akses yang merata ke layanan kesehatan berkualitas (WHO, 2020).

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Program JKN, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan peningkatan kualitas tenaga medis menjadi pilar utama dalam upaya perbaikan sistem kesehatan. Namun, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan fasilitas dan tenaga medis, serta keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Pemerintah perlu terus berinovasi dan melakukan evaluasi untuk memastikan kebijakan kesehatan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.

Definisi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan individu maupun masyarakat. Menurut WHO (World Health Organization), pelayanan kesehatan mencakup berbagai layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, baik di fasilitas kesehatan formal maupun informal, yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengobati, dan memberikan perawatan kepada pasien. Pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada pengobatan, tetapi juga mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta rehabilitasi.

Dalam konteks Indonesia, pelayanan kesehatan diatur oleh Undang-Undang Kesehatan yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak dasar setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan kurang berkembang.

Penting untuk memahami bahwa pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan dalam merancang dan melaksanakan program-program pelayanan kesehatan

Komponen Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Komponen utama dalam pelayanan kesehatan meliputi:

1. **Tenaga Kesehatan.** Tenaga kesehatan yang terlatih dan berkualitas merupakan salah satu komponen kunci dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Menurut data Kementerian Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk di Indonesia masih jauh dari standar WHO, yang idealnya mencapai 4,5 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk.
2. **Fasilitas Kesehatan.** Fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik, merupakan tempat di mana pelayanan kesehatan diberikan. Ketersediaan dan distribusi fasilitas kesehatan yang merata sangat penting untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Namun, masih banyak daerah di Indonesia yang kekurangan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.
3. **Obat dan Perbekalan Kesehatan.** Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai juga merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan berupaya untuk memastikan bahwa obat-obatan yang beredar aman dan efektif. Namun, masalah distribusi dan akses terhadap obat masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil.
4. **Sistem Informasi Kesehatan.** Sistem informasi kesehatan yang baik sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Data yang akurat dan tepat waktu mengenai status kesehatan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
5. **Pendanaan dan Pembiayaan Kesehatan:** Sumber daya finansial yang cukup merupakan komponen penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Dengan memahami komponen-komponen ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Pentingnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Pelayanan kesehatan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Pertama, pelayanan kesehatan yang efektif dapat meningkatkan harapan hidup dan menurunkan angka kematian. Menurut data BPS, angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 72,9 tahun, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat.

Kedua, pelayanan kesehatan yang baik juga berperan dalam pencegahan penyakit. Program-program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat dapat membantu masyarakat untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Misalnya, program imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah berhasil menurunkan angka kejadian penyakit menular seperti campak dan polio di Indonesia.

Ketiga, pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, masalah kesehatan dapat menyebabkan kehilangan produktivitas dan beban ekonomi yang berat bagi keluarga dan masyarakat.

Keempat, pelayanan kesehatan yang adil dan merata dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk mencapai keadilan sosial.

Terakhir, pelayanan kesehatan yang baik juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat memicu protes dan ketidakstabilan. Dengan demikian, investasi dalam pelayanan kesehatan bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk pembangunan bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan, khususnya program JKN, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam hal kualitas layanan dan sistem rujukan masih perlu diatasi. Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang adil, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun telah ada berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan infrastruktur kesehatan, tantangan besar masih tetap ada, seperti kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan. Keberhasilan kebijakan kesehatan sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan bersama dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan menyediakan pelatihan bagi tenaga medis dan memperbaiki infrastruktur.

2. Memperkuat sistem rujukan untuk memastikan pasien dapat dengan mudah mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi antrian yang panjang.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat lebih baik dan lebih merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. W. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Jawa Barat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi. *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 96.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Kesehatan Indonesia.
- BPJS Kesehatan. (2022). Laporan Tahunan BPJS Kesehatan. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Hidayat, R., & Yulianto, A. (2022). Perbandingan Kepuasan Pasien antara Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 123-130.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Indonesia.
- Kementerian Kesehatan. (2022). Statistik Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Nugroho, A. P., Ardani, I., & Effendi, D. E. (2023). Dampak kebijakan akreditasi puskesmas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 14(1), 59-82.
- Pitrianti, L., Novrikasari, N., & Syakurah, R. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 488-498.
- Purba, N. F., Annisa, F. S., Syafitri, A., & Purba, S. H. (2024). Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan publik: Sebuah tinjauan analisis kebijakan. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 8(6).
- Putri, A. R. P. S., & Ningtyas, R. R. M. A. (2023). Transformasi Kesehatan Mental: Tantangan dan Upaya Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19. *PROMOTOR*, 6(1), 37-44.
- Sari, D., & Rahmawati, N. (2021). Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 12(1), 45-60.
- Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92-106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- World Health Organization (WHO). (2021). Health System Strengthening.
- World Health Organization. (2020). Health System Strengthening. Geneva: WHO.
- Yulia, R., Syafiq, A., Pratomo, H., & Sulastrri, N. E. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Layanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Di Kota Depok The Impact Of Covid-19 Pandemic On Maternal And Child Health (Mch) Services In Depok City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 17(2).